Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp. 548 - 559
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

DETERMINAN *FINANCIAL DISTRESS* PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Yoga Andrianda[1], Bainil Yulina[2], Desri Yanto[3]
[1]Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar, e-mail: yogaandrianda02@gmail.com
[2]Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar, e-mail: byulina@gmail.com
[3]Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar, e-mail: desri.yanto@polsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 4 August 2025
Received in revised form 30 October 2025
Accepted 31 October 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This research aims to identify factors that can affect Financial Distress in Regencies and Cities on the Island of Sumatra for the period 2019 to 2023. The population used in this study were Regency and City Governments on the island of Sumatra consisting of 110 regencies and 30 cities. The technique in collecting data is secondary data obtained from the Regional Government financial statements published by the Supreme Audit Agency. The data analysis technique in this study uses panel data regression analysis, namely the R^2 test, t test, F test with an analytical tool in the form of Eviews (Econometric Views) version 13. The test results in this study indicate that the Budgetary Solvency Ratio and Return On Assets have a positive and significant effect on Financial Distress. The Degree of Decentralization and Liquidity Ratio have no effect on Financial Distress. The Degree of Decentralization, Liquidity Ratio, Budgetary Solvency Ratio and Return On Assets simultaneously have a positive and significant effect on Financial Distress.
Keywords: Fiscal Desentralization, Liquidity Ratio, Budgetary Solvency Ratio, Return On Assets, Financial Distress

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Financial Distress pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera periode 2019 hingga 2023. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera yang terdiri dari 110 Kabupaten dan 30 Kota. Jumlah sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling* sebanyak 137 daerah kabupaten dan kota. Teknik dalam mengumpulkan data yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yaitu Uji R^2, Uji t, Uji F dengan alat analisis berupa Eviews *(Econometric Views)* versi 13. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Budgetary Solvency Ratio* dan *Return On Assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Distress*. Derajat Desentralisasi dan Rasio Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Financial Distress. Derajat Desentralisasi, Rasio Likuiditas, *Budgetary Solvency Ratio* dan *Return On Assets* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Distress*.
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Rasio Likuiditas, *Budgetary Solvency Ratio, Return On Assets, Financial Distress*

Received August 4, 2025. Revised October 30, 2025; Accepted October 30, 2025

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur otonomi daerah, telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan sumber daya daerah secara mandiri. Dengan kata lain, daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola wilayahnya di luar urusan yang menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat (Sitepu, 2022). Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik dan pengembangan daerah yang adil merupakan tujuan utama otonomi daerah. Pemerintah daerah telah bertanggung jawab atas pengelolaan urusan mereka sendiri, termasuk layanan publik dan pengembangan daerah, sejak otonomi daerah diberlakukan. Pendidikan, kesehatan publik, keamanan, penegakan hukum, transportasi umum, infrastruktur, dan barang publik merupakan beberapa layanan tersebut.

Menurut data mengenai kualitas layanan publik yang disediakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (2023), 70,70% pemerintah provinsi mendapatkan rapor hijau. Dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya mencapai 46,42%, angka ini menunjukkan adanya peningkatan. Namun, banyak pemerintah kota masih masuk dalam kategori layanan publik yang buruk atau rata-rata. Perbedaan kualitas layanan yang belum terselesaikan di tingkat regional tercermin dalam situasi ini. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua wilayah dapat secara konsisten memenuhi persyaratan layanan publik. Ketika layanan publik tetap di bawah standar, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menyediakan layanan berkualitas bagi masyarakat. Karena situasi keuangan yang rapuh, pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk mendanai infrastruktur layanan publik.

Meskipun pengeluaran modal memengaruhi pembangunan dalam hal penyediaan layanan masyarakat, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur disebabkan oleh rendahnya pengeluaran modal. Pengeluaran modal yang berkualitas ditandai oleh rasio pengeluaran modal terhadap total pengeluaran regional yang relatif tinggi. Di sisi lain, pengeluaran modal yang terbatas mengakibatkan layanan dan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan *financial distress*. *Financial distress*, menurut Jones & Walker (2007), adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memenuhi kriteria kualitas dasar. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menginvestasikan cukup dana dalam infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik.

Anggaran infrastruktur yang rendah seringkali menyebabkan *financial distress*, meskipun anggaran daerah masih didominasi oleh pengeluaran untuk tenaga kerja. Kesejahteraan masyarakat terganggu akibat *financial distress* ini, karena anggota masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang seharusnya dapat diakses, yang dapat menyebabkan *financial distress* mereka sendiri. Situasi ini menggambarkan bagaimana alokasi belanja modal yang rendah mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, seperti Pulau Sumatra, yang memiliki 140 kabupaten/kota, lebih banyak daripada jumlah kabupaten/kota di beberapa pulau lain di Indonesia, dan jumlah provinsi terbanyak (8 provinsi) di negara ini. Anggaran masih sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan operasional daripada investasi infrastruktur jangka panjang, seperti yang terlihat dari ketimpangan antara pengeluaran modal dan pengeluaran tenaga kerja. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa proporsi rata-rata pengeluaran modal untuk semua kabupaten dan kota di Pulau Sumatra tetap relatif rendah bahkan setelah lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023.



Gambar 1. Persentase Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera

Dengan rasio belanja modal terhadap belanja daerah selama periode lima tahun tidak melebihi 21%, Gambar 1.1 menunjukkan bahwa penyerapan belanja modal dari tahun 2019 hingga 2023 di kabupaten dan kota di Pulau Sumatra masih belum optimal. Angka tersebut masih jauh di bawah persyaratan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah menyisihkan setidaknya 40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja modal pada infrastruktur publik.

Menurut Jones & Walker (2007), "pemerintah daerah diharapkan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan memeliharanya guna menyediakan layanan kepada masyarakat." Investasi publik dalam arti investasi pemerintah daerah yang tercermin dalam belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada masa *financial*

distress. Hal ini menunjukkan bahwa investasi infrastruktur masih rendah bagi pemerintah daerah yang tidak mampu memenuhi ambang batas belanja modal 40% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Situasi ini menjadi contoh kemungkinan bahwa pemerintah daerah tersebut mungkin mengalami *financial distress*.

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi kesehatan keuangan pemerintah daerah. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa "tingkat desentralisasi, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang termasuk di antara berbagai jenis rasio keuangan pemerintah daerah." Rasio keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk memprediksi tingkat krisis keuangan mereka. Menurut Jones & Walker (2007), baik indikator keuangan maupun non-keuangan dapat digunakan untuk mengukur *financial distress*. Indikator non-keuangan meliputi efektivitas layanan publik dan kualitas tata kelola, sedangkan indikator keuangan meliputi rasio keuangan dan jumlah dana yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Menurut Teori Agen yang diajukan oleh Jensen & Meckling dalam penelitian oleh Elfiyana & Arza (2022), teori agen menggambarkan hubungan antara dua pihak: prinsipal, yang memberikan wewenang, dan agen, yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas. Menurut penelitian oleh Syarifah dkk. (2023), hubungan agen terdapat di sektor publik antara pemerintah dan masyarakat, dengan masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah, sementara pemerintah bertindak sebagai agen dalam menyampaikan pandangannya.

Dengan menciptakan kebijakan yang sesuai, mengalokasikan anggaran yang tepat, mengelola pengeluaran modal untuk pengembangan infrastruktur secara efektif, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah, sebagai entitas sektor publik, berupaya untuk melayani masyarakat. Hal ini berkaitan dengan *financial distress*, yang dapat dihindari oleh pemerintah daerah jika pemerintah dapat menyediakan layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengelola pengeluaran modal secara efisien.

2.2. *Financial Distress*

Menurut pandangan John & Walker dalam penelitian Eliza dkk. (2021), kondisi *financial distress* di sektor publik terjadi ketika pemerintah tidak mampu memenuhi persyaratan untuk menyediakan layanan publik. Di sektor publik, *financial distress* merupakan akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan layanan atau fasilitas publik yang sesuai dengan standar. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan publik seperti irigasi, pembangunan jembatan, dan proyek-proyek lainnya, serta ketidakmampuan untuk menjaga keseimbangan yang berkelanjutan antara pendapatan regional dan pengeluaran pemerintah daerah.

2.3. Derajat Desentralisasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, desentralisasi fiskal melibatkan pemberian kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dan administratif secara mandiri (Mardiasmo, 2021). Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat desentralisasi. Kontribusi PAD meningkat seiring dengan tingkat desentralisasi. Nilai PAD yang lebih tinggi akan berdampak pada total pendapatan daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada standar layanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, sehingga mengurangi kemungkinan kesulitan keuangan.

H_1: Deraat desentralisasi berpengaruh terhadap *financial distress* pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

2.4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat menggunakan aset lancar mereka untuk membayar utang jangka pendek (Mahmudi, 2019). Jumlah likuiditas yang memadai mengurangi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan dengan memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek mereka secara tepat waktu. Likuiditas yang rendah, di sisi lain, menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan keuangan jangka pendek, yang pada akhirnya dapat menyebabkan krisis keuangan regional. Penurunan kualitas layanan publik dipengaruhi oleh hal ini.

H_2: Rasio likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

2.5. Budgetary Solvency Ratio

Ritonga menyatakan dalam studi Eliza dkk. (2024) bahwa rasio pendapatan total terhadap pengeluaran total diukur menggunakan rasio *budgetary solvency ratio*. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran regionalnya, terutama yang memberikan manfaat jangka panjang, berkorelasi positif dengan rasio

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

budgetary solvency ratio. Akibatnya, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress*, semakin besar angka rasio *budgetary solvency ratio*.
H_3: *Budgetary solvency ratio* berpengaruh terhadap *financial distress* pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

2.6. Return On Assets

ROA menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya mereka untuk menghasilkan pendapatan. Pengelolaan aset yang efektif dan kemungkinan kesuksesan finansial yang kuat ditunjukkan oleh ROA yang tinggi. Di sisi lain, ketidakefisienan dan kurangnya kapasitas fiskal dapat tercermin dalam ROA yang rendah, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya *financial distress*.
H_4: *Return on Assets* berpengaruh terhadap *financial distress* pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data dari studi ini, yang dilakukan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX), tersedia di situs web Badan Pengawas Keuangan dan Pasar Modal Indonesia (www.bpk.go.id). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan Eviews 13 digunakan untuk menganalisis data menggunakan model statistik. Data yang digunakan tersedia untuk digunakan. Karena semua data dikumpulkan secara tidak langsung dari peserta penelitian, data tersebut diklasifikasikan sebagai data sekunder. Selama periode 2019–2023, data tahunan perusahaan dicatat sebagai bagian dari metodologi dokumentasi yang digunakan untuk pengumpulan data. Semua kota dan kabupaten di Sumatra membentuk populasi studi ini. Wilayah-wilayah dengan alokasi belanja modal kurang dari 40% dari total belanja anggaran regional dipilih untuk sampling karena dianggap berisiko mengalami *financial distress*. 137 dari 140 wilayah memenuhi syarat untuk sampling.

Beberapa tahap pengujian statistik digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memberikan ringkasan tentang variabel-variabel yang diteliti. Untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik yang diperlukan, uji asumsi tradisional kemudian dilakukan, seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Langkah berikutnya adalah uji hipotesis, yang melibatkan penggunaan uji F untuk menilai dampak gabungan semua faktor independen terhadap variabel dependen dan uji t untuk menilai signifikansi masing-masing faktor independen. Akibatnya, formulasi model regresi berikut ini dibuat:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_i \quad (1)$$

Keterangan:
Y = *Financial Distress*
α = Konstanta
X1 = Derajat Desentralisasi
X2 = Rasio Likuiditas
X3 = Budgetary Solvency Ratio
X4 = *Return On Assets*
β = Keofisien Regresi
ε_i = *Standard Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.171026	0.109002	20.89210	1.007828	0.007511
Median	0.164200	0.090200	2.762900	1.004900	0.003100
Maximum	0.461900	0.500100	2437.459	1.312500	0.312500
Minimum	0.032800	0.011400	0.008500	0.274400	-0.725600
Std. Dev.	0.058185	0.066762	154.7034	0.066487	0.064904
Skewness	0.761344	1.855141	13.13384	-2.985179	-3.181831
Kurtosis	4.022541	7.227096	183.3036	42.56479	47.08916
Jarque-Bera	96.01907	902.9025	947565.2	45695.72	56636.66
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Sum	117.1530	74.66670	14311.09	690.3620	5.145000
Sum Sq. Dev.	2.315695	3.048732	16370266	3.023678	2.881345
Observations	685	685	685	685	685

Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

Statistik deskriptif yang diperoleh ditampilkan dalam tabel di atas sebagai nilai rata-rata, simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum, sebagai berikut:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan variabel Derajat Desentralisasi (X1). Ukuran sampel (n) sebesar 685 menunjukkan hasil uji statistik yang diproses dalam tabel sebelumnya. Desentralisasi berkisar dari 0,011400 pada tingkat terendah hingga 0,500100 pada tingkat tertinggi, dengan rata-rata 0,10902 dan simpangan baku 0,066762.
2. Untuk menjamin operasional yang efisien dan stabilitas keuangan regional, Rasio Likuiditas (X2) merupakan indikator keuangan yang menilai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban segera mereka menggunakan aset yang tersedia. Ukuran sampel (n) sebesar 685 menunjukkan hasil uji statistik yang diproses dalam tabel sebelumnya. Rasio likuiditas berkisar antara 0,008500 pada nilai terendah hingga 154,7034 pada nilai tertinggi, dengan simpangan baku sebesar 154,7034. Rata-rata rasio likuiditas adalah 20,89210.
3. Untuk mengurangi risiko kesulitan keuangan dan menjamin keberlanjutan fiskal, pemerintah daerah dapat mempertahankan keseimbangan anggaran dengan memastikan bahwa pendapatan operasional cukup untuk menutupi pengeluaran selama periode waktu tertentu. Hal ini diukur melalui variabel *budgetary solvency ratio* (X3). Ukuran sampel (n) sebesar 685 menunjukkan hasil uji statistik yang diproses dalam tabel sebelumnya. Dengan simpangan baku 0,066487, rata-rata rasio solvabilitas anggaran adalah 1,007828, sedangkan nilai terendah dan tertinggi masing-masing adalah 0,274400 dan 1,312500.
4. Rasio yang mengukur seberapa baik pemerintah daerah mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan disebut Return On Assets (X4). Rasio ini menunjukkan seberapa efektif sumber daya digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Ukuran sampel (n) sebesar 685 menunjukkan hasil uji statistik yang diproses dalam tabel sebelumnya. Dengan simpangan baku 0,064904, rata-rata Return on Assets adalah 0,007511, dengan nilai terendah -0,725600 dan nilai terbaik 0,312500.
5. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik sesuai dengan kriteria kualitas layanan yang ditetapkan dikenal sebagai variabel Kesulitan Keuangan (Y). Ketidakmampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik disebabkan oleh kekurangan dana. Hasil uji statistik pada tabel di atas didasarkan pada ukuran sampel (n) sebesar 685. Dengan simpangan baku 0,058185, skor rata-rata Financial Distress adalah 0,171026, sementara nilai terendah dan tertinggi Return On Assets masing-masing adalah 0,032800 dan 0,461900

4.2 Uji Pemilihan Model

Untuk mengidentifikasi model yang tepat untuk digunakan, *Fixed Effect Model, Common Effect Model*, atau *Random Effect Model*, tiga uji digunakan dalam pengujian pemilihan model: uji Chow, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier.*

4.2.1 Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.286917	(136,544)	0.0000
Cross-section Chi-square	576.983885	136	0.0000

Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

Berdasarkan pengujian tersebut menunjukan bahwa nilai *Probability Crosssection Chi-square* sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 maka menerima H_1, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat dibandingkan dengan *Common Effect Model.*

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

4.2.2 Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.093765	4	0.0045

Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

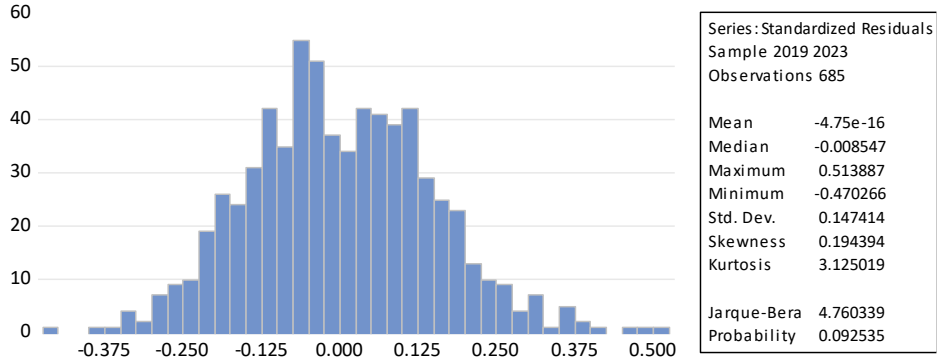
Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai *Probability Cross-section random* memperlihatkan angka bernilai 0,0045, sehingga keputusan yang diambil pada pengujian *Hausman Test* ini yaitu terima H_1 (*P-value* < 0,05), yaitu dapat disimpulkan *Fixed Effect Model* lebih tepat dibandingkan dengan *Random Effect Model.*

Berdasarkan hasil pengujian, *Fixed Effcet Model* (FEM) merupakan teknik model yang paling efektif untuk mengukur dampak Tingkat Desentralisasi, Rasio Likuiditas, *budgetary solvency ratio*, dan *Return on Assets* terhadap *Financial distress* di Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatra.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Memverifikasi validitas dan *reliabilitas* persamaan regresi yang diperoleh merupakan tujuan dari uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis data dan uji hipotesis, akan dilakukan uji asumsi dalam analisis regresi menggunakan uji asumsi klasik, yang meliputi uji berikut: (1) Uji Normalitas, (2) Uji Multikolinearitas, dan (3) Uji Heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menentukan pengaruh derajat desentralisasi, rasio likuiditas, *budgetary solvency ratio*, dan *return on assets* terhadap *financial distress*. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah data *time series*, hanya tiga uji dalam asumsi klasik yang digunakan (Sugiyono, 2023).

4.3.1 Uji Normalitas



Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar berikut, uji normalitas menghasilkan hasil dengan nilai probabilitas 0,092535 > 0,05 dan nilai Jarque-Bera (J-B) sebesar 4,760339. Dengan demikian, data dapat dikatakan terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000188	5.975408	NA
X1	0.007348	3.781155	1.009800
X2	0.000118	3.057398	1.024688
X3	0.035852	1.530396	1.184326
X4	0.009263	1.218896	1.205082

Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

Nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* untuk setiap variabel dalam tabel di atas menunjukkan hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

1. Variabel tingkat desentralisasi memiliki nilai VIF sebesar 1.009800. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada variabel tingkat desentralisasi karena nilai VIF lebih besar dari 10.
2. Variabel rasio likuiditas memiliki nilai VIF sebesar 1.024688. Karena nilai VIF lebih besar dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel rasio likuiditas.
3. Variabel *budgetary solvency ratio* memiliki nilai VIF sebesar 1.184326. Karena nilai VIF lebih besar dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel *budgetary solvency ratio.*
4. Variabel *return on assets* memiliki nilai VIF sebesar 1.205082. Karena nilai VIF lebih besar dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel *return on assets.*

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.222091	Prob. F(4,680)	0.0651
Obs*R-squared	8.838195	Prob. Chi-Square(4)	0.0653
Scaled explained SS	7.638182	Prob. Chi-Square(4)	0.1058

Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

Penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas, menurut tabel di atas, yang menunjukkan bahwa nilai *Obs*R-squared* memiliki *Prob. Chi-Square* sebesar 0,0653 > 0,05.

4.4 Uji Regresi Data Panel

Tabel 6. Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.788779	0.013770	57.28428	0.0000
X1	-0.080415	0.094294	-0.852819	0.3941
X2	-0.017327	0.010447	-1.658675	0.0978
X3	1.283143	0.158265	8.107580	0.0000
X4	0.408469	0.077943	5.240587	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.592622	Mean dependent var		0.792450
Adjusted R-squared	0.487783	S.D. dependent var		0.150647
S.E. of regression	0.107817	Akaike info criterion		-1.435545
Sum squared resid	6.323783	Schwarz criterion		-0.503212
Log likelihood	632.6743	Hannan-Quinn criter.		-1.074784
F-statistic	5.652646	Durbin-Watson stat		2.006991
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0.788779 - 0.080415DD - 0.017327RL + 1.283143BSR + 0408469ROA + e$$

Berikut ini adalah interpretasi dari persamaan di atas:

1. Nilai perkiraan *financial distress* adalah 0,788779, atau 78,87%, dengan asumsi semua variabel independen bernilai nol, berdasarkan konstanta α sebesar 0,788779.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

2. Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan, koefisien regresi untuk Derajat Desentralisasi (DD) sebesar -0,080415 menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan *financial distress* sebesar 8,04% untuk setiap kenaikan 100% pada variabel Derajat Desentralisasi. Di sisi lain, jika semua variabel independen lainnya tetap sama, akan terjadi peningkatan *financial distress* sebesar 8,04% jika variabel Derajat Desentralisasi turun sebesar 100%.
3. Berdasarkan koefisien regresi Rasio Likuiditas (RL) sebesar -0.017327, jika semua variabel independen lainnya tetap konstan, akan terjadi peningkatan sebesar 1,73% dalam *Financial distress* untuk setiap peningkatan sebesar 100% pada variabel Rasio Likuiditas, dan peningkatan sebesar 1,73% dalam *Financial distress* untuk setiap penurunan sebesar 100% pada variabel Rasio Likuiditas.
4. Koefisien regresi *Budgetary solvency ratio* (BSR) sebesar 1.283143 menunjukkan bahwa, dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan, akan terjadi peningkatan sebesar 128,31% dalam *Financial distress* untuk setiap peningkatan sebesar 100% pada variabel BSR, dan penurunan sebesar 128,31% dalam *Financial distress* untuk setiap penurunan sebesar 100% pada variabel BSR.
5. Berdasarkan koefisien regresi ROA sebesar 0,408469, jika semua variabel independen lainnya tetap konstan, maka setiap kenaikan 100% pada variabel ROA akan menyebabkan peningkatan 40,84% dalam *financial distress*, dan setiap penurunan 100% pada variabel ROA akan menyebabkan penurunan 40,84% dalam *financial distress*.

4.5 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.592622	Mean dependent var	0.792450
Adjusted R-squared	0.487783	S.D. dependent var	0.150647
S.E. of regression	0.107817	Akaike info criterion	-1.435545
Sum squared resid	6.323783	Schwarz criterion	-0.503212
Log likelihood	632.6743	Hannan-Quinn criter.	-1.074784
F-statistic	5.652646	Durbin-Watson stat	2.006991
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 13,* data diolah, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,487783, seperti yang tercantum dalam tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi, rasio likuiditas, *budgetary solvency ratio*, dan *return on assets* menjelaskan 48,77% dari *financial distress*, sedangkan faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model studi ini menjelaskan sisanya sebesar 51,23%.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut:

1. Variabel derajat desentralisasi (X1) memiliki nilai thitung sebesar -0.852819. Hasil penelitian diperoleh thitung < ttabel (-0.852819 < 1.6470975) dan nilai probabilitas 0.3941 > 0.05, dengan nilai coefficient sebesar -0.080415. Hal ini berarti derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap financial distress, sehingga hipotesis (H1) yang diajukan penulis ditolak.
2. Variabel rasio likuiditas (X2) memiliki nilai thitung sebesar -1.658675. Hasil penelitian diperoleh thitung < ttabel (-1.658675 < 1.6470975) dan nilai probabilitas 0.0978 > 0.05, dengan nilai coefficient sebesar -0.017327. Hal ini berarti rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress, sehingga hipotesis (H2) yang diajukan penulis ditolak.
3. Variabel budgetary solvency ratio (X3) memiliki nilai thitung sebesar 8.107580. Hasil penelitian diperoleh thitung > ttabel (8.107580 > 1.6470975) dan nilai probabilitas 0,0000 < 0.05, dengan nilai coefficient sebesar 1.283143. Hal ini berarti budgetary solvency ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress, sehingga hipotesis (H3) yang diajukan penulis diterima.
4. Variabel return on assets (X3) memiliki nilai thitung sebesar 5.240587. Hasil penelitian diperoleh thitung > ttabel (5.240587 > 1.6470975) dan nilai probabilitas 0,0000 < 0.05, dengan nilai coefficient sebesar 4.841702. Hal ini berarti return on assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress, sehingga hipotesis (H4) yang diajukan penulis diterima.

4.6.2 Uji F

Berdasarkan nilai probabilitas 0.000000 dan hasil uji F-value sebesar 5.652646. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di bawah ambang batas signifikansi (0.000000 < 0.05) dan nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (5.652646 > 2.3850315). Derajat desentralisasi, rasio likuiditas, *budgetary solvency ratio*, dan *return on assets* merupakan faktor-faktor independen yang secara bersamaan dan bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu kesulitan keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh penolakan Ho karena Fhitung > Ftabel.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Financial Distress

Derajat di mana pemerintah daerah dapat membiayai pengeluaran mereka sendiri menggunakan sumber daya lokal daripada bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dikenal sebagai derajat desentralisasi (Mahmudi, 2019). Derajat desentralisasi seharusnya secara ideal meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi kemungkinan krisis keuangan. Namun, temuan studi ini menunjukkan bahwa penurunan tekanan keuangan tidak selalu terkait dengan peningkatan desentralisasi. Selain itu, peningkatan desentralisasi tidak selalu berarti peningkatan kualitas layanan publik. Meskipun banyak daerah memiliki nilai PAD nominal yang tinggi, pola pendapatan mereka tidak stabil dan berasal dari sumber pendapatan yang tidak berkelanjutan atau didominasi oleh sektor berbasis biaya, yang rentan terhadap fluktuasi. Menurut Halim & Kusufi (2016), desentralisasi memberikan kebebasan kepada daerah, tetapi jika fleksibilitas ini tidak didukung oleh kapasitas fiskal yang lebih besar, hal tersebut tidak membuat daerah lebih sehat secara finansial. Oleh karena itu, kapasitas daerah untuk membiayai layanan esensial seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan bergantung pada transfer dana dari pemerintah provinsi, yang tidak secara signifikan menurunkan kemungkinan krisis keuangan.

Temuan ini sejalan dengan studi Ilahi dkk. (2021) dan Fatmawati dkk. (2023), yang tidak menemukan hubungan antara desentralisasi fiskal dan tingkat kesulitan keuangan. Namun, temuan ini bertentangan dengan studi Elfiyana & Arza (2022), yang menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi memiliki dampak yang merugikan dan signifikan terhadap kesulitan keuangan Indonesia.

4.7.2 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Financial Distress

Kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dimilikinya saat ini diukur dengan rasio likuiditas. Karena rasio ini menunjukkan adanya cukup uang untuk menutupi pengeluaran dan komitmen rutin, suatu daerah cenderung tidak mengalami krisis keuangan jika rasio ini lebih besar. Namun, likuiditas yang tinggi tidak menurunkan kemungkinan bencana keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh studi ini. Halim & Kusufi (2016) menyatakan bahwa realisasi belanja yang buruk dapat menjadi penyebab rasio likuiditas yang tinggi, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mengalokasikan dana publik seefisien yang seharusnya. Hal ini menyiratkan bahwa keberhasilan keuangan yang kuat tidak selalu tercermin dalam tingkat aset lancar atau kas, terutama jika anggaran yang direncanakan tidak terpenuhi tepat waktu. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa penumpukan kas di akhir tahun anggaran merupakan permasalahan umum dalam keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa anggaran tidak digunakan seefisien yang seharusnya untuk meningkatkan layanan publik. Oleh karena itu, likuiditas yang tinggi tidak berpengaruh dalam menurunkan risiko kesulitan keuangan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Meskipun studi Islamiyatun dkk. (2021) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap kesulitan keuangan, studi Hawaria (2019) menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif yang substansial terhadap kesulitan keuangan. Hasil studi ini bertentangan dengan temuan tersebut.

4.7.3 Pengaruh Budgetary Solvency Ratio terhadap Financial Distress

Kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah diukur dengan *Budgetary solvency ratio*. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah jumlah pendapatan yang tersedia cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. *Budgetary solvency ratio* yang tinggi menunjukkan belanja daerah yang lebih rendah atau pendapatan yang lebih tinggi. Rasio yang tinggi ini bukan disebabkan oleh peningkatan kemampuan anggaran, melainkan oleh pemangkasan inisiatif layanan publik dan belanja modal. Realisasi belanja yang rendah, yang mencerminkan penyerapan anggaran yang tidak efisien, menjadi penyebab tingginya rasio pendapatan terhadap belanja, menurut Mardiasmo (2018). Hal ini mengakibatkan penurunan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk mendanai layanan publik seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Temuan studi ini konsisten dengan temuan Armaini dkk. (2020), yang menemukan bahwa kesulitan keuangan dipengaruhi secara positif oleh *budgetary solvency ratio*. Namun, hasil ini bertentangan dengan temuan Lailiyah

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

dan Desitama (2024), yang tidak menemukan hubungan antara kesulitan keuangan Provinsi Jawa Timur dengan *budgetary solvency ratio*.

4.7.4 Pengaruh Return On Assets terhadap Financial Distress

Rasio efisiensi keuangan yang disebut pengembalian aset (ROA) mengukur seberapa baik pemerintah daerah menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Total aset dan surplus pemerintah daerah dibandingkan untuk menentukan rasio ini. Menurut studi ini, ROA berdampak positif terhadap kesulitan keuangan. Pemerintah daerah memiliki rasio keuangan yang tinggi jika memiliki surplus yang besar. Menurut penelitian Wulandari dkk. (2020), selisih surplus yang besar tidak selalu berarti pemerintah daerah memiliki cukup dana untuk mendukung pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah terkait hanya diperbolehkan menyampaikan anggaran kepada pemerintah pusat sebesar realisasi tahun sebelumnya, dan kelebihan anggaran yang dihasilkan wajib dikembalikan ke kas negara. Ketika pemerintah mengurangi belanja untuk proyek modal dan layanan publik, nilai ROA akan terpengaruh. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi keuangan, tetapi peran layanan publik justru melemah, yang menyebabkan ketidakstabilan anggaran jangka panjang.

Hal ini mendukung pandangan Mardiasmo (2018) bahwa kinerja keuangan yang baik belum tentu ditandai dengan surplus anggaran pemerintah. Program-program yang tidak berjalan atau dana yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dapat mengakibatkan surplus, yang menyiratkan bahwa layanan publik tidak tersedia. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki surplus besar lebih mungkin mengalami kesulitan keuangan, yang akan mencegah mereka memenuhi kriteria kualitas layanan dasar. Kemampuan fiskal secara keseluruhan tidak tercermin dalam kinerja aset.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Yuliani & Anggaradana (2021) dan Silanno & Loupatty (2021), yang menemukan bahwa ROA memiliki dampak positif terhadap kesulitan keuangan. Namun, temuan ini berbeda dengan temuan Safitri (2022), yang menemukan bahwa ROA memiliki dampak negatif terhadap kesulitan keuangan.

4.7.5 Derajat Desentralisasi, Rasio Likuiditas, Budgetary Solvency Ratio, dan Return On Assets terhadap Financial Distress

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan regional dipengaruhi secara signifikan oleh kombinasi empat faktor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menganalisis faktor fiskal tunggal secara terpisah tidak cukup, karena tingkat kerentanan fiskal suatu wilayah ditentukan oleh interaksi antara struktur pendapatan, efisiensi aset, kemampuan desentralisasi, dan manajemen kas jangka pendek.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Eliza dkk. (2024), yang menemukan bahwa kesulitan keuangan dipengaruhi oleh rasio solvabilitas anggaran dan tingkat desentralisasi secara bersamaan. Demikian pula, studi oleh Islamiyatun dkk. (2021) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan dipengaruhi oleh rasio likuiditas dan ROA secara bersamaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap Financial Distress Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera.
2. Rasio Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Financial Distress pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera.
3. Budgetary Solvency Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Financial Distress pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera.
4. Return on Assets berpengaruh positif signifikan terhadap Financial Distress pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera.
5. Secara simultan, variabel derajat desentralisasi, rasio likuiditas, budgetary solvency ratio, dan return on assets berpengaruh positif signifikan terhadap Financial Distress Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera.

Penulis memberikan saran dan wawasan berikut berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Di Pulau Sumatra, pemerintah kota dan kabupaten diharapkan dapat memaksimalkan realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pendapatan yang tinggi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelayanan publik selain menciptakan surplus anggaran.
2. Untuk menjamin hasil yang lebih relevan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas waktu penelitian dan meningkatkan ukuran sampel. Lebih lanjut, tingkat *financial distress* dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan faktor-faktor lain seperti rasio utang dan tingkat ketergantungan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Elfiyana, E., & Arza, F.I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi *Financial distress* di Indoesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi,* 4(2), 425-437.

Fakhirah, A. Y., Yulina, B., & Mubarok, H. (2022). Determinasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin: Dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. *Eksistansi,* 11(01).

Fatmawati, N., Andriana, A., & Wardhaningrum, O. A. (2024). Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi *Financial distress* Di Provinsi Jawa Timur. *ACE: Accounting Research Journal*, 3(1), 62-76

Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Fitri, W. (2024). Pengaruh Rasio Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi *Financial distress* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Pulau Sumatera). *(Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).*

Handayani, L., Yulina, B., & Oktarida, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(5), 3078-3090.

Hawaria, S. (2019). Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap *Financial distress* Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di BEI *(Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).*

Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja dalam Memprediksi Status *Financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543-556.

Islamiyatun, S. B. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap kondisi *financial distress*. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 25-34.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Management Behavior, Agency Cost ad Ownership. Journal Of Economics, 3(4), 305-360.

Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *Abacus*, 43(3), 396-418.

Kasmir (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali PERS.

Kustati, K., & Rahayu, S. (2025). The Influence Of Budgetary Solvency Ratio And Local Government Size On The Financial Performance Of Local Governments With *Financial distress* As A Mediating Variable. *Asian Journal Of Management, Entrepreneurship And Social Science*, 5(02), 365-388.

Kusuma, E. P. (2016). *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Edisi Pertama. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe UBB.

Lailiyah, N. I. A., & Desitama, F. S. (2024). Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap *Financial distress* Pemerintah Daerah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952-1973.

Mahmudi, M. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Nurhasanah, S. (2016). *Praktikum Statistika 2: Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, D., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh rasio keuangan terhadap *financial distress* pada industri food and beverage di bursa efek indonesia periode 2017-2019. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 59-64.

Pangku, M., & Radjak, L. I. (2021). Analisis *Financial distress* Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 1-8.

Republik Indonesia (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ritonga (2014). Analisis Laporan *Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Safitri, N. T. (2022). Pengaruh Arus Kas Operasi, Return On Asset, Dan Capital Intensity Terhadap *Financial distress* (Studi Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 *(Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PPI).*

Silanno, G. L., & Loupatty, L. G. (2021). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio Dan Return On Asset Terhadap *Financial distress* Pada Perusahaan-Perusahaan Di Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 85-109

Silvia, D., & Yulistina, Y. (2022). Pengaruh Current Ratio, Return On Asset, Debt To Asset terhadap *Financial distress* Selama Masa Pandemi. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 89-99.

Sitepu, A. P., & SE, M. A. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.* CV. Azka Pustaka.

Syafrida, H. (2015). *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Medan: UMSU PERS.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Syarifah, A., Masnila, N., & Indriasari, D. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi *Financial distress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 358-368.

Wibowo, A., & Susetyo, A. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Operating Capacity, Sales Growth Terhadap Kondisi *Financial distress* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA),* 2(6), 927-947.

Yuliani, N. K., & Anggaradana, I. N. (2021). Pengaruh Net Profit Margin, Return On Asset, Likuiditas Terhadap *Financial distress* (Studi Kasus Pada Perusahaan Agriculture Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019): Net Profit Margin, Return On Asset, Likuiditas, *Financial distress*, Agriculture. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1-9.